

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

MUHAMMAD SUCI REZA FAUZI
B 200 160 364

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD SUCI REZA FAUZI
B 200 160 364

Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen pembimbing



(Fauzan, S.E., M.Si., Ak)
NIDN : 0605016701

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**

Oleh:

MUHAMMAD SUCI REZA FAUZI
B 200 160 364

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 25 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. Fauzan, S.E., M.Si., Ak
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Atwal Arifin, Ak, M.Si.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Zulfikar, S.E., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Dr. Syamsudin, M.M.)
NIDN: 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Februari 2020

Penulis



Muhammad Suci Reza Fauzi
B20016036

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah BPPKAD Kabupaten Grobogan. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan BPPKAD Kabupaten Grobogan sebanyak 35 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan bantuan *SPSS 24*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Abstract

This research aimed to analyze and test the effect of competence of human resources, implementation of regional financial accounting system, utilization of information technology, and internal control system on the quality of government regional financial statement. The population of this research are all employee in BPPKAD Grobogan regency. The sample of this research are employee in BPPKAD Grobogan regency as many as 35 respondents. To get the sample is using saturation sampling technique. Analysis of data on this research is using multiple linear analysis, with the help of *SPSS 24*. The result showed that internal control system has an effect on the quality of regional government financial statement, while the competence of human resources, implementation of regional financial accounting system, and utilization of information technology doesn't has an effect on quality of regional government financial statement.

Keywords: quality of regional government financial statement, competence of human resources, implementation of regional financial accounting system, utilization of information technology, and internal control system.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan entitas pelapor yang ditugaskan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Masih banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan ketentuan dan adanya penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggungjawab dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dan berupaya untuk meningkatkan kualitas dari LKPD tersebut.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang berkompeten dan memahami prosedur penyusunan laporan keuangan yang benar. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan, agar tercipta laporan

keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik. Kompetensi SDM bisa dikatakan sebagai kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ada hal yang mendasar dan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Penerapan sistem akuntansi ini berfungsi sebagai mekanisme, prosedur kerja, dan alat kontrol dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas suatu laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi, antara lain: mempercepat proses transaksi, perhitungan, penyimpanan dan lain sebagainya.

Kualitas LKPD juga ditentukan oleh sistem pengendalian intern yang dimiliki setiap institusi dalam pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan, karena kegiatan operasional memerlukan kebijakan yang mampu mengatur dan memberikan ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dalam laporan keuangan juga berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan datanya. Dengan sistem pengendalian intern yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan dapat diminimalisir sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah melakukan kesalahan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mokoginta, et al (2017). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Mokoginta, et al dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Perbedaan lainnya adalah menambahkan dua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis termotivasi untuk mengetahui tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang berada di BPPKAD Kabupaten Grobogan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode sampel jenuh, yakni teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan datanya dilakukan menggunakan metode angket, yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden.

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang menyajikan informasi yang berkualitas dan berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) – Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang pada suatu bidang tertentu, sehingga mampu bekerja dengan efektif dan efisien, serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar tujuannya tercapai. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) – Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

2.1.3 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2)

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah implementasi sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, tepat waktu, dan andal, sehingga mampu menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk pengambilan suatu keputusan. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) – Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan berbagai tugas dan meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan fungsinya. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) – Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern (X_4)

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan karyawannya untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5. Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) – Skor 5 untuk Sangat Setuju (SS).

2.2 Metode Analisis Data

Metode pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Model persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_4 = Sistem Pengendalian Intern

e = *error term*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini diukur menggunakan uji *one-sample Kolmogorov Smirnov*. Adapun hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

| | <i>Kolmogorov-Smirnov Z</i> | <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | Standar Sig. | Ket. |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| Unstandardized Residual | 0,116 | 0,200 | > 0,05 | Normal |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

3.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Adapun hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | <i>Tolerance</i> | <i>VIF</i> | Keterangan |
|--|------------------|------------|---------------------------------|
| Kompetensi Sumber Daya Manusia | 0,554 | 1,806 | Tidak terjadi multikolinieritas |
| Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 0,447 | 2,238 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,441 | 2,267 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Sistem Pengendalian Intern | 0,609 | 1,642 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas.

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | <i>p-value</i> | Keterangan |
|--|----------------|-----------------------------------|
| Kompetensi Sumber Daya Manusia | 0,915 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 0,258 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,153 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Sistem Pengendalian Intern | 0,678 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.2 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| | B | t _{hitung} | Sig. |
|--|--------|---------------------|-------|
| Constant | 0,482 | 0,132 | 0,896 |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₁) | -0,024 | -0,154 | 0,879 |
| Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₂) | 0,286 | 1,780 | 0,085 |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₃) | 0,296 | 1,431 | 0,163 |
| Sistem Pengendalian Intern (X ₄) | 0,492 | 2,853 | 0,008 |

Sumber: Data primer yang diolah, 2020.

Dari tabel tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,482 - 0,024X_1 + 0,286X_2 + 0,296X_3 + 0,492X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 3.2.1 Nilai konstanta sebesar +0,482 menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,482.
- 3.2.2 Koefisien regresi pada kompetensi sumber daya manusia menunjukkan koefisien sebesar -0,024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kompetensi sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin menurun.
- 3.2.3 Koefisien regresi pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan koefisien regresi sebesar +0,286. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

- 3.2.4 Koefisien regresi pada pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan koefisien sebesar +0,296. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
- 3.2.5 Koefisien regresi pada sistem pengendalian intern menunjukkan koefisien sebesar +0,492. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sistem pengendalian intern, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat.

3.3 Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji t adalah sebagai berikut:

- 3.3.1 Variabel kompetensi sumber daya manusia diketahui memiliki nilai t_{hitung} (-0,154) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,879) lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_1 ditolak yang berarti kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3.3.2 Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diketahui memiliki nilai t_{hitung} (1,780) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,085) lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_2 ditolak yang berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3.3.3 Variabel pemanfaatan teknologi informasi diketahui memiliki nilai t_{hitung} (1,431) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,163) lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_3 ditolak yang berarti pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3.3.4 Variabel sistem pengendalian intern diketahui memiliki nilai t_{hitung} (2,853) lebih besar dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,008) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga H_4 diterima yang berarti sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.4 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai F_{hitung} (12,261) lebih besar dari F_{tabel} (2,679) dengan p-value (0,000) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang menunjukkan model regresi yang fit. Dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.5 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji R^2 diperoleh angka koefisien determinasi dengan Adjusted R^2 sebesar 0,570. Hal ini menunjukkan bahwa 57% variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern, sedangkan sisanya 43% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t_{hitung} (-0,154) < dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,879) > 0,05, sehingga H_1 ditolak yang berarti kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi sumber daya manusia pada BPPKAD Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya memahami tentang teori keuangan, akuntansi dan pengetahuan lainnya yang menyebabkan kurangnya kompetensi dalam pengelolaan laporan keuangan. Pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kurang berkompeten akan sulit untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triwahyuni (2016), dan Suhardjo (2019).

3.6.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} (1,780) < t_{tabel} (2,042)$ dan nilai signifikansi $(0,085) > 0,05$, sehingga H_2 ditolak yang berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh pengelola laporan keuangan belum diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan dan pengenalan sistem akuntansi keuangan daerah secara keseluruhan, serta kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lumintang, et al (2017), dan Suhardjo (2019).

3.6.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai $t_{hitung} (1,431) < t_{tabel} (2,042)$ dan nilai signifikansi $(0,163) > 0,05$, sehingga H_3 ditolak yang berarti pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai BPPKAD Kabupaten Grobogan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kurang dimanfaatkan dengan baik, dikarenakan pemerintah yang kurang siap dalam menerapkan sistem teknologi informasi dengan lebih baik. Pemerintah masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga banyak para pegawai yang tidak mampu memaksimalkan kemudahan teknologi informasi untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015), Ningrum (2018).

3.6.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t_{hitung} (2,853) $> t_{tabel}$ (2,042) dan nilai signifikansi (0,008) $< 0,05$, sehingga H_4 diterima yang berarti sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi sistem pengendalian intern pada BPPKAD Kabupaten Grobogan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang andal dapat terpenuhi jika mampu menyajikan fakta secara jujur dan informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang material. Untuk itu diperlukannya sistem pengendalian intern dalam mencegah segala hal yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah (2017) dan Utama (2017).

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (-0,154) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,879) lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang artinya H_1 ditolak.
- 4.1.2 Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (1,780) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,085) lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang artinya H_2 ditolak.
- 4.1.3 Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (1,431) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,163) lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang artinya H_3 ditolak.

- 4.1.4 Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (2,853) lebih besar dari t_{tabel} (2,042) dan nilai signifikansi (0,008) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang artinya H_4 diterima.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya, antara lain:

- 4.2.1 Penelitian hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga memiliki kemungkinan respon yang bias.
- 4.2.2 Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya pegawai BPPKAD, sehingga hasilnya kurang untuk digeneralisasi secara luas.
- 4.2.3 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPPKAD, belum adanya kriteria yang ditentukan sehingga hasilnya memiliki respon yang bias.

4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat diusulkan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

- 4.3.1 Peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan metode lain diluar kuesioner, seperti wawancara untuk mengatasi kelemahan pada data kuesioner.
- 4.3.2 Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas sampel penelitian ke instansi pemerintah lainnya agar hasilnya bisa digeneralisasi secara luas.
- 4.3.3 Peneliti selanjutnya disarankan untuk menetapkan kriteria pada responden agar hasil penelitian tidak bias.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, M. Rifky, S. Rahayu, dan M. Muslih. 2017. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 15 (2), 201-210.

- Andelina, M. Widya, dan A. Hariyanto. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Vol. 8 (2), 132-153.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Kurniawati, I., Rispantyo, dan D. Kristianto. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 14 (1), 76-88.
- Lumintang, G. Smylie, L. Lambey, dan S. J. Tangkuman. 2017. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12 (2), 950-962.
- Mildamayanti, M. Abdullah, dan M. Akib. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, Vol. 3 (2).
- Mokoginta, N., L. Lambey, dan W. Pontoh. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12 (2), 874-890.
- Ningrum, K. Kencana. 2018. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Pujanira, P., dan A. Taman. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, Vol. 6 (2), 14-28.
- Rahmawati, A., I. W. Mustika, dan L. H. Eka. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKP Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20 (2), 8-17.
- Ramadhani, M., A. N. Soerono, dan W. Mulyasari. 2018. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 12 (1), 40-63.
- Suhardjo, Y. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi*, Vol. 17 (4), 1-22.
- Surastiani, D. Puri, dan B. Dwi Handayani. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 7 (2), 139-149.
- Triwahyuni, M. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akunansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, Vol. 3 (1), 2312-2326.
- Utama, R. Julia. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Lapporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekon*, Vol. 4 (1), 1429-1443.
- Yuliani, N. Laila, dan R. Dwi Agustini. 2016. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 14 (1), 56-64.